

**ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS SERTA KONTRIBUSI
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN(PBB-P2)
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

(Studi di Badan Pengelola dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh

Muhammad Soleh Arifin

1551010226

Program Studi : Ekonomi Syariah



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2020 M**

**ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS SERTA KONTRIBUSI
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN
(PBB-P2) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

(Studi di Badan Pengelola dan Retribusi Daerah Kab. Lampung Selatan)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)



Pembimbing I : Hj. Mardhiyah Hayati, S.P., M.S.I

Pembimbing II : Ulul Azmi Mustofa, S.E.I., M.S.I

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2020 M**

ABSTRAK

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebagai salah satu komponen yang mendukung dan mempunyai pengaruh terhadap besarnya bagian dana yang akan diterima oleh daerah. Dalam upaya lebih mendorong kemandirian keuangan daerah, Salah satu pendapatan yang diperoleh untuk meningkatkan angka Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah dengan meningkatkan pendapatan dalam sektor pajak. PBB-P2. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah: Apakah Pengaruh tingkat efisiensi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015-2018? Apakah Pengaruh tingkat efektifitas penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015-2018? Apakah pengaruh tingkat kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Lampung Selatan tahun 2015-2018? Bagaimana efisiensi dan efektifitas serta kontribusi dari penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lampung Selatan dalam Perspektif Ekonomi Islam? Dan manfaat serta Tujuan dari penelitian ini adalah: untuk mengetahui tingkat efisiensi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Lampung Selatan dari tahun 2015-2018, untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Lampung Selatan dari tahun 2015-2018, untuk mengetahui tingkat kontribusi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Lampung Selatan dari tahun 2015-2018, dan untuk mengetahui efisiensi dan efektivitas serta kontribusi dari penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lampung Selatan dari Tahun 2015-2018 dalam Perspektif Ekonomi Islam. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan studi deskriptif, dan dengan teknik analisis deskriptif menggunakan indikator nilai interpretasi efisiensi, efektivitas dan kontribusi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efisiensi penerimaan PBB-P2 Kabupaten Lampung Selatan tahun 2015-2018 secara keseluruhan menunjukkan kriteria nilai interpretasi sangat efisien, dengan rata-rata presentase sebesar 2,47%. Tingkat Efektivitas penerimaan PBB-P2 Kabupaten Lampung Selatan tahun 2015-2018 secara keseluruhan menunjukkan kriteria nilai interpretasi sangat efektif, dengan rata-rata presentase sebesar 148,78%. Kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Selatan tahun 2015-2018 secara keseluruhan menunjukkan kriteria nilai interpretasi sangat kurang, dengan rata-rata presentase sebesar 7,27%.

Kata Kunci: *Efisiensi, Efektivitas, Kontribusi, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dan Pendapatan Asli Daerah(PAD)*



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: JL. H. Endro Suratmin, Sukarame Bandar Lampung, Telp. ☎ (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS SERTA KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI DI BADAN PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN)**

Nama : **M. Soleh Arifin**
NPM : **1551010226**
Jurusan : **Ekonomi Syariah**
Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**

MENYETUJUI

Untuk di munaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyahkan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

Mardhiyah Hayati, S.P., M.S.I

Ulul Azmi Mustofa, S.E.I., M.S.I

NIP. 197605292008012010

NIP. -

Mengetahui

Ketua Jurusan Ekonomi Syariah

Madnasir, S.E., M.S.I

NIP. 197504242002121001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. H. Endro Suratmin, Sukarame Bandar Lampung, Telp. ☎ (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan berjudul **"ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS SERTA KONTRIBUTSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI DI BADAN PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN)"**. Di susun oleh **M. Soleh Arifin, NPM: 1551010226**, Jurusan **Ekonomi Syariah**, telah diujikan dalam sidang munaqosah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: **Jum'at, 07 Februari 2020**.

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : **Madnasir, S.E., M.Si**

Sekretaris : **Adib Fachri, M.E.Sy**

Penguji I : **Fatih Fuadi, M.S.I**

Penguji II : **Mardhiyah Hayati, S.P., M.S.I**

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

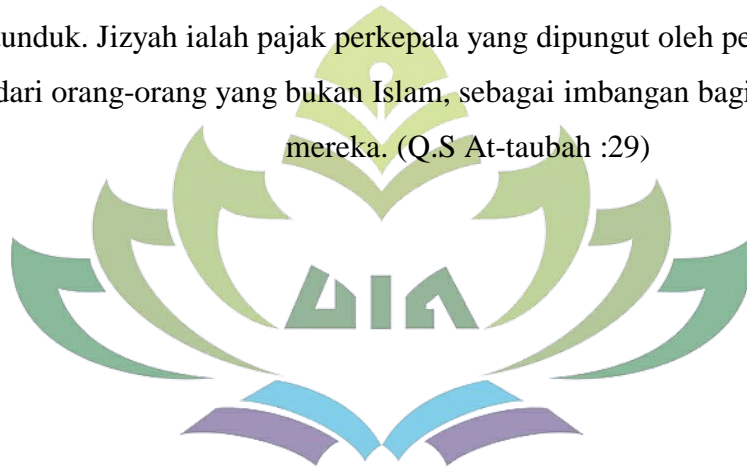
Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I

NIP. 198008012003121001

MOTTO

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا
الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

(Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk. Jizyah ialah pajak perkepala yang dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan Islam, sebagai imbangannya bagi keamanan diri mereka. (Q.S At-taubah :29)



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan dan kekuatan kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Murdi dan Ibunda Karsiti, terima kasih atas cinta, kasih sayang, pengorbanan, dukungan, motivasi serta do'a kalian yang tulus dan tidak pernah berhenti memberikan dukungan moral dan materi serta motivasi disetiap waktuku menuntut ilmu. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT dan senantiasa diberikan keberkahan dalam setiap langkahnya.
2. Kedua kakak-kakakku tercinta Iin Muhyati dan Mamah Khomariah terima kasih untuk kalian selalu menjadi penghibur dalam setiap lelahku dan selalu menjadi sumber semangat dan do'a sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga kita bisa meraih kesuksesan dan membuat orang tua kita selalu tersenyum bahagia serta selalu berusaha menjadi anak yang berbakti kepada orang tua Aamiin.
3. Almaterku tercinta tempatku menimba ilmu UIN Raden Intan Lampung, semoga selalu jaya, maju dan semakin berkualitas.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Muhammad Soleh Arifin dilahirkan diPalas Kalianda Lampung Selatan, pada tanggal 04 Februari 1997 yang meupakan anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Murdi dan Ibu Karsiti. Adapun riwayat pendidikan penulis yaitu Pendidikan Sekolah Dasar ditempuh di SD Negri 3 Bangunan, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan yang diselesaikan pada tahun 2009. Lalu melanjutkan ke jenjang Madrasah Tsanawiyah di MTs N 2 Palas, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan yang diselesaikan pada tahun 2012. Selanjut itu melanjutkan ke jenjang Madrasah Aliyah di MA Ma'arif Bumi Restu yang diselesaikan pada tahun 2015. Penulis diterima sebagai mahasiswa di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung melalui jalur UM-PTKIN pada tahun 2015.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya berupa ilmu pengetahuan, petunjuk, kesehatan, sehingga, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Efisiensi dan Efektivitas Serta Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (studi di Badan Pengelola dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan)”**. Shalawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang telah menegaskan kalimat Tauhid serta membimbing umatnya ke jalan yang penuh cahaya dan semoga kita termasuk kaum yang mendapat syafaatnya di hari akhir nanti, Aamiin.

Skripsi yang ditulis ini merupakan bagian dan persyaratan untuk menyelesaikan studi pendidikan program Strata satu (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE).

Atas terselesaikannya skripsi ini tak lupa penulis mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang turut berperan dalam proses penyelesaian, secara rinci penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Hj. Mardhiyah Hayati, S.P M.S.I selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan memberi arahan dalam membimbing serta memberrikan motivasi selama proses penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Bapak Ulul Azmi Mustofa, S.E.I M.S.I selaku Pembimbing II telah meluangkan waktu dan memberi arahan dalam membimbing serta memberrikan motivasi selama proses penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Kepada seluruh Bapak/Ibu Dosen serta Karyawan yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
5. Pimpinan dan karyawan perpustakaan yang telah memberikan pelayanan yang baik dalam mendapatkan informasi dan sumber referensi, data, dan lain-lain.
6. Bapak Zulkarnain S.E selaku Kepala bagian Pengelolaan Pajak dan seluruh karyawan yang senantiasa membantu penulis dalam melaksanakan penelitian dan bersedia meluangkan waktu, memberikan informasi setra data-data yang penyusun butuhkan dalam menyusun skripsi ini.
7. Sahabat-sahabat hijrah, Ziki Baihaqi, Aditya Mahendra, Riski M Rasid, Soni Sanjaya, Panji Triantoro, Ali Sodiq, Ridho Fadilah, M. Fajar Maulana Sesunan, Ahmad Prayoga, M. Andreansyah, Sugandi dan Teman satu kamar saya Sigit

Wariyadi yang selama ini menjadi teman terbaik dalam bertukar informasi, serta memberiku semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Teman-teman seperjuangan angkatan 2015 khususnya prodi Ekonomi Islam D yang selalu bersama selama perkuliahan serta memberikan semangat dan dukungan.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi diharapkan betapapun kecilnya karya tulis (skripsi) ini dapat menjadi sumbangan yang memberikan manfaat dan pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya keilmuan yang terkait dengan Ekonomi dan Bisnis.



Bandar Lampung 24 februari 2020

Penulis

Muhammad Soleh Arifin
NPM.1551010226

DAFTAR ISI

HALAMANJUDUL	i
ABSTRAK	ii
PENGESAHAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. PenegasanJudul	1
B. AlasanMemilihJudul	3
C. LatarBelakang	4
D. Batasan Masalah	13
E. RumusanMasalah	14
F. TujuanandanManfaatPenelitian	14
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kajian Teori	17
1. Konsep dan Pengertian Efisiensi	17
2. Jenis-jenis Efisiensi	18
3. Indikator Efisiensi	18
4. Konsep dan Pengertian Efektivitas	20
Indikator Efektivitas	21
5. Konsep dan Pengertian Kontribusi	22
Kriteria Kontribusi	23
6. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	24

7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).....	26
8. Pendapatan Daerah.....	28
9. Pajak Bumi dan Bangunan dalam Islam.....	32
10. Dana Perimbangan.....	33
11. Lain-lain Pendapatan yang Sah.....	34
B. Tinjauan Pustaka.....	34
C. Kerangka Pemikiran.....	36
D. Hipotesis.....	40
1. Efisiensi dan Efektifitas Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah.....	42
2. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapan Asli Daerah.....	42
BAB III METODELOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	43
B. Data dan Sumber.....	44
C. Metode Pengumpulan Data.....	44
1. Dokumentasi.....	44
2. Studi Pustaka.....	45
3. Wawancara.....	45
D. Tehnik Pengolahan dan Analisis Data.....	45
E. Populasi dan Sampel.....	46
1. Analisis Tingkat Efisiensi Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan PBB-P2.....	47
2. Analisis Tingkat Efektivitas Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan PBB-P2.....	48
3. Analisis Kontribusi Pajak Bumidan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan PBB-P2 Terhadap Pendapatan Asli Daerah.....	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian.....	53
1. Efisiensi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	

PBB-P2 di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015-2018.....	53
2. Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan PBB-P2 di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015-2018	55
3. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan PBB-P2 Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015-2018.....	57
B. Pembahasan	
1. Pengaruh Efisiensi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan PBB-P2 di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015-2018.....	59
2. Pengaruh Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan PBB-P2 di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015-2018	64
3. Pengaruh Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015-2018.....	69
4. Bagaimana Efisiensi dan Efektivitas Serta Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan PBB-P2 Dalam Perspektif Ekonomi Islam.....	74

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Undang-undang Pajak Bumi Dan Bangunan UU 34/2000 dan UU 28/2009.....	8
Tabel 2 Capaian target sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2015-2018.....	10
Tabel 3 Interpretasi Nilai Efisiensi.....	19
Tabel 4 Interpretasi Nilai Efektivitas.....	22
Tabel 5 Interpretasi Nilai Kontribusi.....	24
Tabel 6 Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	35
Tabel 7 Interpretasi Nilai Efisiensi.....	48
Tabel 8 Interpretasi NilaiEfektivitas.....	49
Tabel 9 Interpretasi NilaiKontribusi.....	51
Tabel 10 Efisiensi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan danPerkotaan (PBB-P2) Tahun 2015-2018.....	54
Tabel 11 Efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan danPerkotaan (PBB-P2) tahun 2015-2018.....	56
Tabel 12 Kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan danPerkotaan (PBB-P2) terhadap pendapatan asli daerah tahun 2015-2018.....	58
Tabel 13 Interpretasi Nilai Efisiensi.....	61
Tabel 14 Interpretasi NilaiEfektivitas.....	66
Tabel 15 Interpretasi NilaiKontribusi.....	71

DAFTAR GAMBAR

Tabel 1 kerangkapemikiran.....	40
--------------------------------	----



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan tersebut, diharapkan tidak akan terjadi kesalah pahaman terhadap pemakaian judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses permasalahan yang akan dibahas.

Adapun skripsi ini berjudul: **“ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS SERTA KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM.”** Untuk itu perlu di uraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut :

1. Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.¹

¹Ratmini dan Septi Antik Winarsih, *Manajemen Pelayanan (Pustaka Belajar Yogyakarta 2000)* h.2

2. Efisiensi

Efisiensi adalah suatu ukuran keberhasilan sebuah kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya biaya/sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.²

3. Efektifitas

Efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-yujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya.³

4. Kontribusi

Kontribusi adalah sesuatu yang dilakukan untuk membantu menghasilkan atau mencapai sesuatu bersama-sama dengan orang lain, atau untuk membantu membuat sesuatu yang sukses.⁴

5. Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/ kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya.⁵

6. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan di dalam daerahnya sendiri.

² Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2009), h.4

³ *Ibid* h.4

⁴ Mahmudi, *Manajemen Keuangan Daerah*, (Jakarta: Erlangga, 2010), h.12

⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009, pendapatan asli daerah.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan memilih judul “Analisis Efisiensi dan Efektivitas serta Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Yaitu sebagai berikut :

1. Alasan Objektif

Pemerintah daerah setiap tahunnya memiliki target dalam penerimaan PBB-P2 sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, namun terkadang penerimaan pajak tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dikarenakan kurangnya kesadaran dari wajib pajak di Kabupaten Lampung Selatan. Sehingga perlu adanya strategi yang khusus untuk meningkatkan target penerimaan pajak khususnya tentang PBB-P2 dengan cara melakukan sosialisasi perpajakan yang dapat membuat wajib pajak lebih memahami mengenai perpajakan dan dapat menimbulkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Hal tersebut akan mendorong Pemerintah Daerah untuk lebih menggali potensi penerimaan PAD dari sektor PBB PP di daerahnya.⁶

2. Alasan Subjektif

- a. Penelitian ini belum pernah dilakukan atau diteliti dan dibahas sebelumnya oleh para mahasiswa UIN Raden Intan Lampung khususnya untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

⁶A.W.Widjaja, *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2002), h.32

- b. Judul yang diajukan sesuai dengan bidang keilmuan yang sedang penulis pelajari saat ini, yakni berhubungan dengan jurusan Ekonomi Syari'ah.
- c. Penelitian ini dirasa mampu untuk diselesaikan oleh penulis, mengingat adanya ketersediaan bahan literatur yang cukup memadai serta data dan informasi lainya yang berkaitan dengan penelitian baik data sekunder dan data primer memiliki kemudahan akses serta akses letak objek penelitian mudah dijangkau oleh penulis.

C. Latar Belakang

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintahan tingkat atas (subsidi). Pendapatan Asli Daerah dikategorikan dalam pendapatan rutin anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu pendapatan yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan daerah dalam menggali

pendapatan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan atas desentralisasi.⁷

Pada tahun 2001 atau tepatnya sejak diberlakukannya undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah, pemerintah melaksanakan otonomi daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah yang lebih efisien, efektif dan bertanggung jawab. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah dalam rangka memberikan pelayanan, meningkatkan peran serta, dan pemberdayaan masyarakat yang pada akhirnya bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat.⁸ Tujuan pengalihan pengelolaan PBB-P2 menjadi pajak daerah sesuai dengan undang-undang pajak daerah dan retribusi daerah adalah: Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, memberikan peluang baru (menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah) memberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi dengan memperluas basis pajak daerah, dan menyerahkan fungsi pajak sebagai instrumen penganggaran dan pengaturan pada daerah. Pemerintah daerah kini mempunyai tambahan sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari pajak daerah, sehingga saat ini jenis pajak kabupaten atau kota terdiri dari sebelas jenis pajak, yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak

⁷ Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), h.52

⁸ Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti, *Akuntansi Sektor Publik Edisi 2*, (Jakarta: Salemba Empat, 2016), h. 23-24.

mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, dan pajak sarang burung walet.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lain-lain yang sah. Sumber-sumber pendapatan PAD menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah..⁹

Salah satu pendapatan yang di peroleh untuk meningkatkan angka Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah dengan meningkatkan pendapatan dalam sektor pajak. Dalam upaya lebih mendorong kemandirian keuangan daerah, pada tahun 2009 lahirlah Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah (UU DPRD) yang mulai berlaku tanggal 1 januari 2010.

Diberlakukannya undang-undang republik Indonesia nomor 28 tahun 2009 sebagai pengganti undang-undang republik Indonesia nomor 34 tahun 2000 telah mengubah system pengelolaan pajak bumi dan Bangunan khususnya sector perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) yang

⁹Raudhatun Wardani dan Wida Fadhlia, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vol. 2, No.3, h. 10-17, www.jim.unsyiah.ac.id, diakses 24 februari 2019, pukul 14.01 WIB.

awalnya merupakan pajak pusat kini menjadi pajak daerah.¹⁰ Dengan pengalihan ini maka kegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan pelayanan PBB-P2 akan diselenggarakan oleh pemerintah daerah.¹¹ Upaya lain yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD namun tidak membebani masyarakat adalah dengan cara menjadikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) sebagai pajak daerah. Untuk meningkatkan PAD dan pemahaman serta kesadaran masyarakat tentang PBB PP sebagai salah satu sumber pendapatan daerah maka pemerintah perlu mensosialisasikan PBB PP tersebut. Dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE- 98/PJ./2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Efektivitas penerimaan pajak daerah menggambarkan kinerja suatu pemerintahan daerah. Efektivitas dipakai untuk menghitung hubungan antara jumlah pengutan suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan. Efektifitas dapat pula dikatakan sebagai pengukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Efektifitas ialah sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara pasti ditentukan untuk hasil jumlah supaya mencapai sejumlah barang atas kegiatan yang dituju. Kontribusi dalam pajak daerah ialah

¹⁰Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: ANDI OFFSET, 2004), h. 152.

¹¹Oyok Abuyamin, *Perpajakan Pusat dan Daerah*, (Bandung: Humaniora, 2013), h. 324.

sebagaimana jumlah dana yang dikumpul oleh sector pajak di suatu daerah dibanding jumlah hasil penerimaan daerah. Kontribusi dalam PBB-P2 adalah suatu nilai untuk mengetahui tingkat kontribusi yang dihitung berdasarkan persentase perbandingan realisasi penerimaan PBB-P2 dengan realisasi (PAD).¹² Pengalihan keseluruhan PBB-P2 baik pemungutan maupun pengelolaan diharapkan akan membawa dampak positif. Karena dari pajak daerah ini, menjadi salah satu sumber pembangunan kota agar semakin ditingkatkan.

Tabel 1
Undang-undang pajak bumi dan bangunan UU 34/2000 dan UU 28/2009

UU 34/2000	UU 28/2009
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak hotel 2. Pajak restoran 3. Pajak hiburan 4. Pajak reklame 5. Pajak penerangan jalan PPJ 6. Pajak parkir 7. Pajak pengambilan bahan galian Gol. C 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak hotel 2. Pajak restoran 3. Pajakn hiburan 4. Pajak reklame 5. Pajak penerangan jalan 6. Pajak parkir 7. Pajak mineral bukan logam dan batuan (perubahan nomenklatur) 8. Pajak air tanah (pengalihan dari prov) 9. Pajak sarang burung walet (baru) 10. PBB perdesaan dan perkotaan (baru) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (baru)

Sumber: materi presentasi “pengalihan PBB-P2 dan BPHTB sebagai pajak daerah,” direktorat jendral pajak. Agustus 2001.

¹² *Ibid*, h. 200-209

PBB-P2 sebagai salah satu komponen yang mendukung dan mempunyai pengaruh terhadap besarnya bagian dana yang akan diterima oleh daerah. Oleh karena itu, PBB-P2 perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah daerah dalam penanganannya. Mengingat pentingnya kontribusi yang diberikan oleh penerimaan PBB-P2 bagi pembiayaan pembangunan, maka pemungutan PBB-P2 harus dilakukan secara efektif. dalam meningkatkan kontribusi PBB-P2 terhadap PAD pemerintah harus mengupayakan supaya masyarakat wajib pajak sadar akan kewajibannya dalam membayar pajak dengan cara mensosialisasikan perpajakan. Pemerintah daerah diharapkan mampu memberikan pelayanan publik yang baik, mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru dan memperbaiki pendapatan masyarakat. karena dengan hal tersebut akan menciptakan peningkatan penerimaan atau pendapatan daerah itu sendiri, salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak salah satunya adalah faktor ekonomi.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Lampung Selatan menyatakan wajib pajak (WP) pada tahun 2015 sebesar 162,45% dan penduduk kabupaten lampung selatan yang menjadi masyarakat yang wajib pajak adalah 972.579 jiwa dan di tahun 2016 ini terjadi peningkatan sebesar 171,05% dengan jumlah penduduk yang wajib pajak yaitu 982.885 jiwa. Di tahun 2016 disini mengalami kenaikan sebesar 8,6% sehingga kesadaran WP di kabupaten Lampung Selatan mengalami peningkatan dan bagi pemerintah patut diapresiasi dan dipertahankan. Namun di tahun 2017 terjadi penurunan

bagi WP sebesar 168,06% dengan jumlah penduduk yang wajib pajak yaitu 992.763 jiwa. Dan ditahun 2018 ini terjadi peningkatan untuk sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mencapai 240,6% dengan jumlah penduduk yaitu 1.002.285 WP. Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan PBB dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) BPPRD Lampung Selatan, Edi Novian, mengatakan meningkatnya WP untuk sektor PBB ini berasal dari pendataan ulang yang dilakukan pihak BPPRD Lampung Selatan terutama 10 Unit Pelaksana Teknis (UPT) PBB yang ada di kecamatan.¹³

Adapun sumber Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan PBB-P2 dengan pajak yang lainnya seperti berikut:

Tabel 2
Capaian target sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2015-2018

Sumber-sumber PAD	2015	2016	2017	2018
Pajak Hotel dan Restoran	100,3	100,13	107,05	108,46
Pajak Reklame	101,52	104,01	113,43	117,45
Pajak Penerangan Jalan	98,26	88,69	73,03	62,89
Pajak Parkir	88,44	75,01	89,81	112,31
Pajak Hiburan	100,5	100,19	100,03	100,12
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan perkotaan (PBB-P2)	162,45	171,05	168,06	240,6

Di akses 16 desember 2019

Jika dilihat tabel 2 diatas, dilihat dari pajak hotel dan restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak hiburan dan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Namun tahun ke tahun capaian target

¹³ Edi Novian Kabid PBB dan BPHTB BPPRD Lampung Selatan (kanan) Tengah Ditemui Dikantornya, jum'at (25/11/2019).

sumber-sumber PAD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2015-2018 sangat berfluktuasi. Capaian target tertinggi pada pajak bumi dan bangunan pada tahun 2018 yaitu sebesar 240,6% dan capaian target terendah terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 162,45%. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan PBB-P2 Kabupaten Lampung Selatan dari tahun ke tahun sangat efisien untuk capaian target.

Jadi dalam beberapa perbandingan pajak diatas, pajak bumi dan bangunan sangat efektif untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Pajak bumi dan bangunan (PBB-P2) dalam hukum islam dijelaskan bahwasanya pajak itu sama dengan zakat karna memenuhi suatu kewajiban bernegara dan beragama, ayat yang menjelaskannya seseorang wajib pajak dan mengharamkan suatu yang batil yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(Q.S. An Nisa:29)”¹⁴

Tafsir dari ayat di atas menyatakan bahwasannya Ayat ini menerangkan hukum transaksi secara umum, lebih khusus kepada transaksi perdagangan,

¹⁴Tafsir Al-Muyassar/Kementrian Agama Studi Arabia (Online), Tersedia di: <https://tafsirweb.com>, (22 juli 2019)

bisnis jual beli. Sebelumnya telah diterangkan transaksi muamalah yang berhubungan dengan harta, seperti harta anak yatim, mahar, dan sebagainya. Dalam ayat ini Allah mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan, (dan segala bentuk transaksi lainnya) harta orang lain dengan jalan yang batil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syari'at. Kita boleh melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan perdagangan dengan asas saling ridha, saling ikhlas. Dan dalam ayat ini Allah juga melarang untuk bunuh diri, baik membunuh diri sendiri maupun saling membunuh. Dan Allah menerangkan semua ini, sebagai wujud dari kasih sayang-Nya, karena Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kita¹⁵

Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadits yang mengisahkan dilaksanakannya hukum rajam terhadap pelaku zina (seorang wanita dari Ghamid), setelah wanita tersebut diputuskan untuk dirajam, datanglah Khalid bin Walid Radhiyallahu 'anhu menghampiri wanita itu dengan melemparkan batu ke arahnya, lalu darah wanita itu mengenai baju Khalid, kemudian Khalid marah sambil mencacinya, maka Rasulullah SAW bersabda:

“Demi dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sesungguhnya perempuan itu telah benar-benar bertaubat, sekiranya seorang pemungut pajak bertaubat sebagaimana taubatnya wanita itu, niscaya dosanya akan diampuni.” (HR. Muslim III/1321 no: 1695, dan Abu Daud II/557 no.4442.

¹⁵Majelis Kajian Interaksi Tafsir Ayat Al-Qur'an" (Online), Tersedia di: <http://mkitasolo.blogspot.com/> (18 juli 2019)

*dan di-shahih-kan oleh syaikh Al-Albani dalam Silsilah Al-Ahadits Ash-Shahihah hal. 715-716)*¹⁶

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Pendapatan asli daerah merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintahan tingkat atas (subsidi).¹⁷ Pendapatan asli daerah merupakan suatu pendapatan yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan asli daerah yang sah.

D. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari konteks yang telah di rencanakan, maka peneliti membatasi konteks penelitian sebagai berikut: Penelitian ini menggunakan data kuantitatif, penelitian dengan analilis Efisiensi dan Efektivitas serta Kontribusi pajak bumi dan bangunan PBB-P2 Terhadap Pendapan Asli Daerah Tahun 2015-2018. Dan data yang digunakan pada penelitian ini adalah laporan keuangan atau laporan tahunan.

¹⁶Pusat Ilmu Nusantra” (Online), Tersedia di: <https://dalamislam.com> (18 juli 2019)

¹⁷Rudi Saputro dkk, “Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Studi pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya”, <https://media.neliti.com>, diakses 25 februari 2019, pukul 11.00 WIB.

E. Rumusan Masalah

1. Apakah Pengaruh tingkat efisiensi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015-2018?
2. Apakah Pengaruh tingkat efektifitas penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015-2018?
3. Apakah pengaruh tingkat kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Lampung Selatan tahun 2015-2018?
4. Bagaimana efisiensi dan efektifitas serta kontribusi dari penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lampung Selatan dalam Perspektif Ekonomi Islam?

F. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun yang menjadikan tujuan penulisan latar belakang diatas ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui tingkat efisisensi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Lampung Selatan dari Tahun 2015-2018.
- b. Untuk mengetahui tingkat efektifitas penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Lampung Selatan dari Tahun 2015-2018.

- c. Untuk mengetahui tingkat kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Lampung Selatan dari Tahun 2015-2018.
- d. Untuk mengetahui efisiensi dan efektivitas serta kontribusi dari penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lampung Selatan dari Tahun 2015-2018 dalam Perspektif Ekonomi Islam.

2. Manfaat penelitian

Dalam suatu penelitian pasti ada manfaat yang diharapkan dapat tercapai. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai proses pengalihan pengelolaan PBB menjadi pajak daerah. Mengetahui tingkat efisiensi, efektivitas dan kontribusi PBB-P2 terhadap pendapatan asli daerah.

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan bagi masyarakat mengenai peran pemerintah dalam mensosialisasikan PBB-P2 dan dampaknya terhadap pendapatan asli daerah.

c. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan evaluasi bagi pemerintah mengenai tingkat efisiensi, dan efektivitas serta kontribusi PBB-P2 terhadap pendapatan asli daerah, sehingga pihak pemerintah dapat melakukan dan mengoptimalkan pendapatan asli daerah.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Konsep dan Pengertian Efisiensi

Efisiensi adalah pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu atau penggunaan *input* yang terendah untuk mencapai *output* tertentu.¹⁸ Efisiensi merupakan perbandingan *output/input* yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.¹⁹ Efisiensi merupakan hubungan antara barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan sebuah kegiatan/ aktivitas dengan sumber daya (*input*). Menurut Bayangkara, efisiensi merupakan ukuran proses yang menghubungkan antara *input* dan *output* dalam operasional perusahaan. Efisiensi juga dapat dikatakan sebagai suatu ukuran proses yang dapat dinilai dari penggunaan *input* (biaya dan sumber daya) tertentu untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari kegiatan yang dilakukan. Menurut penulis menyimpulkan bahwa efisiensi merupakan ukuran pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu atau dengan penggunaan *input* terendah untuk mencapai *output* tertentu.

¹⁸Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2009), h. 4.

¹⁹Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti, *Akuntansi Sektor Publik Edisi 2*, (Jakarta: Salemba Empat, 2010), h. 161.

2. Jenis-jenis Efisiensi

a. Efisiensi optimal

Efisiensi optimal merupakan perbandingan terbaik antara pengorbanan yang dilakukan dengan hasil yang didapatkan yang sesuai dengan yang diharapkan.

b. Efisiensi dengan tolak ukur merupakan perbandingan antara hasil minimum yang telah ditentukan sebelumnya dengan hasil nyata yang dicapai. Artinya dapat dikatakan efisien apabila hasil nyata lebih besar dari angka minimum hasil yang ditentukan sebelumnya.

c. Efisiensi dengan titik impas merupakan jenis efisiensi yang sering digunakan pada berbagai bidang usaha, dimana titik impas (*break even point*) merupakan titik batas antara usaha yang efisien dan tidak efisien.

3. Indikator Efisiensi

Menurut Mardiasmo, indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi (misalnya: staf, upah, biaya administratif) dan keluaran yang dihasilkan. Indikator tersebut memberikan informasi tentang konversi masukan menjadi keluaran (yaitu: efisiensi dari proses internal). Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan

realisasi pendapatan yang diterima.²⁰ Sehingga efisiensi yang dimaksud adalah perbandingan antara penggunaan input (biaya), untuk proses pemungutan PBB-P2, dengan realisasi penerimaan PBB-P2 dapat ditulis dengan rumus:

$$\text{Efisiensi PBB - P2} = \frac{\text{Biaya Pemungutan PBB-P2}}{\text{Realisasi Penerimaan PBB-P2}} \times 100\%$$

Input dari proses pemungutan PBB ini adalah biaya pemungutan atau Biaya Operasional Pemungutan (BOP) dan *output*nya adalah realisasi penerimaan PBB-P2. Menurut Mahmudi, perhitungan tingkat efisiensi tersebut dapat dinilai dengan kriteria berikut:²¹

Tabel 3
Interpretasi Nilai Efisiensi

Persentase (%)	Kriteria
<5	Sangat Efisien
5-11	Efisien
11-20	Cukup Efisien
21-30	Kurang Efisien
>30	Tidak Efisien

Semakin kecil nilai rasio efisiensi ini maka semakin baik kinerja pemerintah dalam melakukan pemungutan pendapatan.²² Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100 persen. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. Untuk itu pemerintah daerah perlu

²⁰ Abdul Halim, *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2004), h.152.

²¹ Mahmudi, *Akuntansi Sektor Publik Edisi Revisi*, (Yogyakarta: UII Press, 2016), h. 171.

²² Mahmudi, *Akuntansi Sektor Publik Edisi Revisi*, h. 171.

menghitung secara cermat berapa besarnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak. Hal itu perlu dilakukan karena meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya lebih besar daripada realisasi pendapatan yang diterimanya.²³

4. Konsep dan Pengertian Efektivitas

Efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Keefektifan bias diartikan tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang akan dicapai.

Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dengan *output*.²⁴ Efektivitas menunjukkan kesuksesan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan sebuah kegiatan/ kebijakan dimana ukuran efektivitas merupakan refleksi *output*. Efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas merupakan hubungan antara

²³ Abdul Halim, *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, h.152.

²⁴ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, h. 4

output dengan tujuan.²⁵ Menurut Mardiasmo, efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya boleh jadi melebihi apa yang telah dianggarkan, boleh jadi dua kali lebih besar atau bahkan tiga kali lebih besar daripada yang telah dianggarkan. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Efektivitas adalah mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan potensi atau target penerimaan pajak itu sendiri.²⁶ Efektif atau tidaknya pungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang dilakukan di Kabupaten Lampung Selatan akan dapat dilihat dari hasil yang telah dicapai dengan disesuaikan pada target awal yang telah ditentukan. Menurut penulis menyimpulkan bahwa Efektivitas merupakan ukuran yang menentukan keberhasilan sebuah organisasi dilihat dari ketercapaian hasil yang telah diprogramkan dengan target yang direncanakan.

Indikator Efektifitas

Menurut Mardiasmo, indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*)

²⁵Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti, *Akuntansi Sektor Publik Edisi 2*, h. 161.

²⁶Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, h. 132-134.

program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi keluaran yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja yang dilakukan suatu unit organisasi.²⁷ Menurut Mahmudi, tingkat efektivitas dapat diketahui dari hasil hitung formulasi efektivitas. Formula untuk mengukur efektivitas terkait dengan perpajakan adalah perbandingan antara realisasi pajak dengan target pajak. Rumus yang digunakan dalam menghitung tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah:

$$\text{Efektivitas PBB - P2} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB - P2}}{\text{Target Penerimaan PBB - P2}} \times 100\%$$

Tabel 4
Interpretasi Nilai Efektivitas

Persentase (%)	Kriteria
<100	Sangat Efisien
91-100	Efisien
90-99	Cukup Efisien
75-89	Kurang Efisien
>75	Tidak Efisien

5. Konsep dan Pengertian Kontribusi

Menurut Mahmudi, kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauhmana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam mengetahui kontribusi dilakukan denganmembandingkan penerimaan pajak daerah (khususnya pajak bumi danbangunan perdesaan perkotaan) periode tertentu dengan penerimaan

²⁷ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik Edisi Revisi*, h. 132-134.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) periode tertentu pula.²⁸ Kontribusi dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan dari PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah. Jika pemerintah dapat mengoptimalkan sumber penerimaan PBB P2 dan potensi penerimaannya semakin tinggi maka kontribusi terhadap pendapatan asli daerah akan meningkat. Menurut penulis kontribusi merupakan ukuran untuk mengetahui besarnya sumbangan pajak daerah khususnya Pajak PBB-P2 terhadap pendapatan asli daerah.²⁹

Kriteria Kontribusi

Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap pendapatan asli daerah dapat menggunakan rumus sebagai berikut :³⁰

$$\text{Kontribusi PBB - P2} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB - P2}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Untuk mengukur besarnya kontribusi maka digunakan indikator pada Tabel 5 di bawah ini.

²⁸ Mahmudi, *Manajemen Keuangan Daerah*, (Jakarta: Erlangga, 2010), h. 12.

²⁹ Raudhatun Wardani dan Wida Fadhlia, "Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Besar", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)* Vol. 2, No.3, (2017), hal 10-17, www.jim.unsyiah.ac.id, diakses 25 februari 2019, pukul 14.01 WIB.

³⁰ Abdul Halim, *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, h. 152.

Tabel 5
Interpretasi Nilai Kontribusi

Presentase %	Kriteria
0,00-10	Sangat Kurang
10,10-20	Kurang
20,10-30	Sedang
30,10-40	Cukup Baik
40,10-50	Baik
>50	Sangat Baik

Sumber: Munir dkk (dalam rudi saputro dkk)

Rasio ini bermanfaat untuk mengetahui tingkat kontribusi perusahaan pemerintah dalam mendukung pendapatan negara.³¹

6. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia . Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah:

- a. Jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan kompleks bangunan.
- b. Jalan tol.
- c. Kolam renang.
- d. Pagar mewah.
- e. Tempat olahraga, Galangan kapal, dermaga.

³¹Rudi Suprpto dkk, "Efektifitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) Terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Studi pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya", <http://media.neliti.com>, diakses 30 oktober 2019,

- f. Taman mewah.
- g. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak.
- h. Fasilitas lain yang memberikan manfaat.³²

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan/ atau bangunan dikenakan terhadap subyek pajak orang pribadi atau badan yang secara nyata:

- a. Mempunyai hak atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau,
- b. Memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan.³³

Pada saat pajak PBB dikelola oleh pemerintah pusat, penerimaan negara dari pajak PBB dibagi dengan imbangan 10% (sepuluh persen) untuk pemerintah pusat dan 90% (sembilan puluh persen) untuk daerah. Dana bagi hasil PBB untuk daerah sebesar 90% sebagaimana dimaksud tersebut dibagi dengan rincian sebagai berikut:

- a. 16,2% untuk daerah Provinsi yang bersangkutan.
- b. 64,8 % untuk Kabupaten/ Kota yang bersangkutan.
- c. 9% untuk biaya pemungutan.

Selanjutnya 10% penerimaan pajak PBB bagian pemerintah pusat sebagaimana pembagian tersebut dialokasikan kepada seluruh Kabupaten dan Kota, dengan rincian sebagai berikut:

- a. 6,5 % dibagikan secara merata kepada seluruh Kabupaten dan Kota.

Pembagian ini dimaksudkan dalam rangka pemerataan kemampuan keuangan antar daerah.

³²Mardiasmo, Perpajakan -EdisiTerbaru 2018, h. 363

³³Oyok Abuyamin, Perpajakan Pusat dan Daerah, (Bandung: Humaniora, 2013), h. 324.

- b. 3,5 % dibagikan insentif kepada Kabupaten dan/ atau Kota yang realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan pada tahun anggaran sebelumnya mencapai/ melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan. Pemberian insentif ini dimaksudkan untuk mendorong intensifikasi pemungutan pajak PBB.³⁴

Setelah pengalihan ini, semua pendapatan dari sektor PBB-P2 akan masuk ke dalam kas pemerintah daerah. Hasil dari pengelolaan pajak tersebut 100% (seratus persen) masuk ke kas daerah setempat, sehingga tidak akan ada lagi bagi hasil pajak kepada pemerintah pusat.³⁵

7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tanggal 15 September 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, wewenang untuk memungut Pajak Bumi dan Bangunan sektor perdesaan dan perkotaan diserahkan ke pemerintah kabupaten atau kota. Penyerahan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan kepada pemerintah kabupaten/kota dimulai 1 Januari 2011 dan paling lambat 1 Januari 2014.

a. Pengertian PBB Perdesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau

³⁴ Aulia Sukmawati, "Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Banyumas Periode Tahun 2013-2015", diakses 30 Juni 2019, pukul 18.00 WIB.

³⁵ Rudi Saputro dkk, "Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Studi pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya", <https://media.neliti.com>, diakses 30 Oktober 2019, pukul 11.00 WIB.

dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Sedangkan untuk sektor usaha perkebunan, perhutanan, pertambangan dan usaha tertentu lainnya masih dipungut oleh pemerintah pusat.

b. Objek Pajak

Objek PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

c. Subjek dan Wajib Pajak

Subjek PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/ atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/ atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/ atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/ atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas bangunan.

a. Cara Menghitung PBB

PBB Perdesaan dan Perkotaan dihitung dengan cara: $PBB\ PP = \text{tarif} \times (NJOP - NJOPTKP)$

b. Tarif PBB

Tarif PBB Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggisebesar 0,3% (nol koma tiga persen). Tarif PBB Perdesaan danPerkotaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

c. Mekanisme PBB Perdesaan dan Perkotaan.

PBB-P2 dikenakan setiap tahun. PBB terutang dihitung menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari. Tempat PBB terutang adalah di wilayah daerah yang meliputi letak objek pajak.

Pendataan terhadap objek pajak PBB dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP). SPOP harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Kepala Daerah yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak.

8. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah dikelompokan atas:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009, pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan, bahwa pendapatan asli daerah bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.³⁶

Menurut Mahsun dkk, Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.³⁷

Menurut Abdul Halim, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah.³⁸

b. Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-

³⁶Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009, pendapatan asli daerah.

³⁷Mohamad Mahsun dkk, *Akuntansi Sektor Publik Edisi 2*, h. 39.

³⁸Abdul Halim, *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, h. 67.

besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu pendapatan asli daerah yaitu pajak daerah. Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Daerah ialah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jenis-jenis pajak daerah yaitu ada pajak provinsi dan kabupaten atau kota.

- a. Pajak Provinsi, terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea baliknama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok.
- b. Pajak Kabupaten/kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, Pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

1) Retribusi Daerah.

Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Objek retribusi daerah adalah:

- a. Jasa Umum.
- b. Jasa Usaha.
- c. Perizinan Tertentu.³⁹

2) Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan.

Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut

- a. Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah.
 - b. Bagian Laba Lembaga Keuangan Bank.
 - c. Bagian Laba Lembaga Keuangan Non Bank.
 - d. Bagian Laba atas Penyertaan Modal/Investasi.
- 3) Lain-lain PAD yang Sah.

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:

- a. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan.
- b. Penerimaan jasa giro.
- c. Penerimaan bunga deposito.
- d. Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.

³⁹Mardiasmo, *Perpajakan -Edisi Terbaru 2018*, h. 14-18.

- e. Penerimaan ganti rugi atas kerugian/kehilangan kekayaan daerah
- f. (TP-TGR).

9. Pajak Bumi dan Bangunan dalam Islam

Secara etimologi, pajak dalam bahasa arab diartikan sebagai dengan nama *adh-dharibah*, yang berasal dari kata *dharaba*, *yadharibu*, *dharaban* yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan memukul, menerangkan atau membebaskan, dan lain-lain. *Dharaba* adalah bentuk kata kerja, sedangkan dalam bentuk kata benda adalah *dharibah* yang dapat diartikan beban. Disebut beban karena merupakan kewajiban tambahan atas harta selain zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai beban.⁴⁰ Adapun dalil sebagaimana firman allah yang dituliskan dalam al-quar'an dalam surat An-nisa ayat 59, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan

⁴⁰Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah Edisi Revisi* (Jakarta:Rajawali pers, 2011), h.28

*hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*⁴¹

Allah SWT, melarang hamba-hambanya yang beriman memakan harta sebagian dari mereka atas sebagian yang lain dengan cara yang batil, yaitu melalui usaha yang tidak disukai oleh syariat, seperti dengan cara riba dan judi serta cara lain-lainnya yang termasuk kedalam kategori tersebut dengan menggunakan berbagai macam tipuan dan pengelabuan. Sekalipun pada lahiriahnya cara-cara tersebut memakai cara yang diakui oleh hukum syara' tetapi Allah lebih mengetahui bahwa sesungguhnya para pelakunya hanyalah semata-mata menjalankan riba, tetapi dengan tipu muslihat. Demikianlah yang terjadi pada kebanyakannya.⁴²

10. Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang di alokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Kelompok pendapatan berupa dana perimbangan ini digolongkan menjadi 3 jenis pendapatan (untuk provinsi) dan menjadi 4 jenis pendapatan (untuk kabupaten/kota), yakni

1) Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak yang meliputi:

a. Bagi Hasil Pajak.

⁴¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Bandung :CV Penerbit Diponogoro), 2005

⁴²Nasib Muhammad Ar-rifa'i, *Kemudahan dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid I* (Jakarta: Gema Insani, 1999), h.692

- b. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam.
- 2) Dana Alokasi Umum.
- 3) Dana Alokasi Khusus, yang meliputi:
 - a. Dana Alokasi Khusus Reboisasi.
 - b. Dana Alokasi Khusus Nonreboisasi
- 4) Bagi hasil pajak dan bantuan keuangan dari Provinsi (untuk kabupaten/kota).

11. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Sebelum munculnya Undang-undang Nomor 29 Tahun 2002, pendapatan ini diklasifikasikan dalam Dana Perimbangan. Dengan adanya Kepmendagri tersebut, pendapatan ini digolongkan tersendiri.

Kelompok pendapatan ini meliputi:

- 1) Bantuan Dana Kontinjensi/Penyeimbang dari Pemerintah.
- 2) Dana Darurat.⁴³

B. Tinjauan Pustaka

Sebelumnya sudah pernah dilakukan penelitian yang berkaitan dengan variabel-variabel yang peneliti gunakan yang akan dijelaskan pada tabel dibawah ini:

⁴³ Abdul Halim, *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, h. 68-69.

Tabel 6
Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Voni Lestari	“Analisis Pengaruh Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) Terhadap Penerimaan Pendapatan Daerah Kota Kediri Tahun 2012 dan 2013”	Dengan adanya pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan dari pajak pusat menjadi pajak daerah mempengaruhi pendapatan daerah Kota Kediri. Pendapatan daerah mengalami kenaikan, hal ini karena sebelum adanya pengalihan PBB-P2 daerah hanya mendapatkan bagi hasil dari pajak pusat sebesar 64,8% , setelah adanya pengalihan 100% pendapatan dari pembayaran PBB-P2 menjadi pendapatan daerah Kota Kediri.	Menggunakan variabel yang sama dengan penelitian sebelumnya yaitu PBB P2 dan penerimaan daerah	Penelitian sebelumnya mengambil objek penelitiannya di kota Kediri
Galih Wicaksono & Tree Setiawan Pamungkas	Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember Tahun 2013-2015	Tingkat efektivitas PBB-P2 pada tahun 2013 berada dalam kategori cukup efektif, sedangkan pada tahun 2014 dan 2015 berada dalam kategori kurang efektif. Untuk tingkat kontribusi PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), menunjukkan bahwa pada tahun 2013-2015 tingkat kontribusi pada kategori sangat kurang.	Persamaan Variabel Efektivitas dan Kontribusi PBB-2	Perbedaan Variabel Efisiensi
Kinanti Amalia Sari	Analisis sebelum dan sesudah	Selama tahun 2011-2014 tingkat efisiensi penerimaan PBB-P2	Persamaan	Perbedaan 4 tahun Setelah

	<p>pengalihan pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) Menjadi Pajak Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Jember) Tahun 2011-2014</p>	<p>secara keseluruhan menunjukkan kriteria sangat efisien, trend kecenderungan turun. Tingkat efektivitas penerimaan PBBP2 tahun 2011 menunjukkan tidak efektif, tahun 2012 dan 2014 menunjukkan kurang efektif, tahun 2013 (saat pengalihan) menunjukkan cukup efektif. Trend kecenderungan naik. Kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah secara keseluruhan dapat dikatakan kecil. Trend kecenderungan naik.</p>	<p>Variabel Efisiensi, Efektivitas dan Kontribusi PBB-P2.</p>	<p>pengalihan PBB-P2, dan Subyek Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas.</p>
--	---	---	---	--

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang akan diidentifikasi sebagai masalah penting.⁴⁴

Pada tahun 2001 atau tepatnya sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah melaksanakan otonomi daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah yang lebih efisien, efektif, dan bertanggung jawab. UU 32/2004 tentang Pemerintah Daerah

⁴⁴Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), h. 117.

merupakan perubahan dan penyempurnaan terhadap UU 22/1999 dengan perihal yang sama.⁴⁵

Semenjak sistem otonomi daerah diberlakukan, otonomi daerah menjadi hal yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan di daerah, dikarenakan setiap daerah harus mampu menggali dan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah.⁴⁶ Konsekuensi dari penerapan otonomi daerah yaitu setiap daerah dituntut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai urusan rumah tangganya sendiri.

Dalam upaya lebih mendorong kemandirian keuangan daerah, pada tahun 2009 lahirlah Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2010. Undang-undang ini menggantikan undang-undang yang berlaku sebelumnya yakni UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Diberlakukannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 telah mengubah sistem pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan khususnya sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang awalnya merupakan pajak pusat kini menjadi pajak daerah. Hal ini

⁴⁵Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti, *Akuntans iSektor Publik Edisi 2*, h. 22.

⁴⁶Reza Arditia, "Analisis Kontribusi dan Efektifitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya", diakses 26 februari 2019, pukul 14.00 WIB.

merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Dengan pengalihan ini maka kegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan atau penagihan dan pelayanan PBB-P2 akan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota).⁴⁷

Tujuan Pengalihan pengelolaan PBB-P2 menjadi pajak daerah sesuai dengan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah: Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, memberikan peluang baru kepada daerah untuk mengenakan pungutan baru (menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah), memberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi dengan memperluas basis pajak daerah, memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif pajak daerah, dan menyerahkan fungsi pajak sebagai instrumen penganggaran dan pengaturan pada daerah.

Dengan pengalihan ini, penerimaan PBB-P2 akan sepenuhnya masuk ke pemerintah kabupaten/kota sehingga diharapkan mampu meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah. Pada saat pajak PBB dikelola oleh pemerintah pusat, penerimaan negara dari pajak PBB dibagi dengan imbalan 10% (sepuluh persen) untuk pemerintah pusat dan 90% (Sembilan puluh persen) untuk daerah. Setelah pengalihan ini, semua pendapatan dari sektor PBB-P2 akan masuk ke dalam kas pemerintah daerah. Hasil dari pengelolaan pajak tersebut

⁴⁷*Ibid*,

100% (seratus persen) masuk ke kas daerah setempat, sehingga tidak akan ada lagi bagi hasil pajak kepada pemerintah pusat.⁴⁸

Keberhasilan sebuah organisasi sector public tidak dapat diukur semata-mata dari perspektif keuangan. Surplus atau deficit dalam laporan keuangan tidak dapat menjadi tolak ukur keberhasilan. Karena sifat dasarnya yang tidak mencari profit, keberhasilan sebuah organisasi sector publik juga harus diukur dari kinerjanya. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk melakukan penilaian kinerja, yaitu untuk menilai sukses atau tidaknya suatu organisasi, program atau kegiatan.⁴⁹

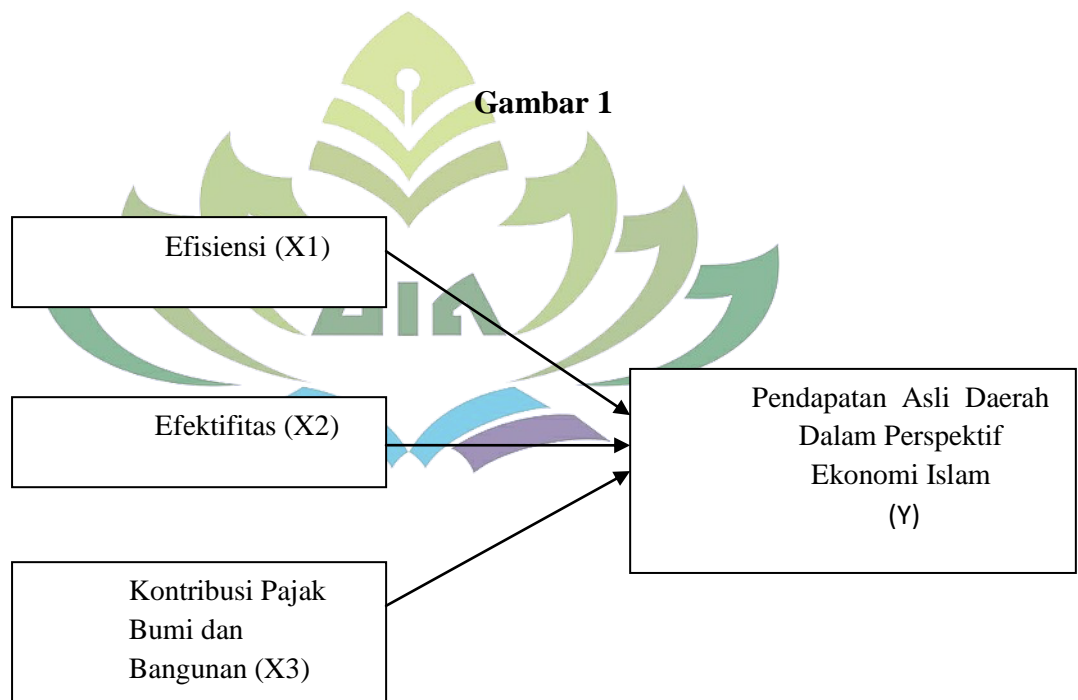
Pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.⁵⁰ Dengan mengukur kinerja, organisasi dapat mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi, menyediakan sarana pembelajaran pegawai, memperbaiki kinerja periode berikutnya, memberikan pertimbangan yang sistematis dalam pembuatan keputusan pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*), memotivasi pegawai, dan menciptakan akuntabilitas publik. Sehingga, pengukuran kinerja Badan Pengelola dan Retribusi Daerah, perlu dilakukan sebagai salah satu bentuk pengendalian,

⁴⁸Rudi Saputrodkk, "Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Studi pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya", <https://media.neliti.com>, diakses 05 maret 2019, pukul 09.00 WIB.

⁴⁹Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti, *Akuntansi Sektor Publik Edisi 2*, h. 157.

⁵⁰Mohamad Mahsun dkk, *Akuntansi Sektor Publik Edisi 2*, h. 157.

yang bermanfaat untuk Badan Pengelola dan Retribusi Daerah di masa mendatang. Mengukur kinerja suatu organisasi, program, atau kegiatan dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan memperhitungkan rasio efesiensi dan rasio efektivitas. Selain itu, memperhitungkan kontribusi suatu komponen pendapatan terhadap total pendapatan juga perlu dilakukan untuk melihat proporsinya terhadap keseluruhan pendapatan yang diterima organisasi.



D. Hipotesis

Hipotesis merupakan suatu proposal/ Pernyataan atau jawaban sementara/dugaan yang mungkin benar dan digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan/ penyelesaian dari suatu masalah untuk diteliti. maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Efisiensi dan Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Efektivitas pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di gambarkandalam hasil penelitian kota manado 95,52% (efektif) lebih tinggi dari kabupaten minahasa selatan 88,12% (cukup efektif).

Menurut Felia Lintong, Harijanto Sabijono, Meily Y. B. Kalalo. Efektivitas pada pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) menunjukan bahwa kota manado sebesar 95,52% (efektif) lebih tinggi dibandingkan minahasa selatan 88,12% (cukup efektif). Ini menunjukan kota manado dalam efektifitas PBB-P2 selama tiga tahun terakhir lebih baik dibandingkan dengan kabupaten minahasa selatan. Pada tahun 2015 kabupaten minahasa selatan saat adanya pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah menunjukan realisasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan jauh diatas target yang ditentukan, dimana dalam tahun 2015 tingkat keefektifitasnya digolongkan tidak efektif sedangkan pada tahun 2016 tingkat keefektifitasnya naik menjadi efektif.⁵¹

H₁: hasil penelitian ini menunjukan bahwa kota manado dan kabupaten minahasa selatan memiliki pertumbuhan yang baik.

⁵¹Felia Lintong, Harijanto Sabijono, Meily Y. B. Kalalo, “*Analisis Efektifitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Manado*” 13 april 2018. h. 207-208

2. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Kontribusi dalam pendapatan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada pendapatan asli daerah kabupaten minahasa selatan 4,55% (sangat kurang), dan kota manado 9,46% (sangat kurang).

Menurut Felia Lintong, Harijanto Sabijono, Meily Y. B. Kalalo, kontribusi dalam menerima pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada pendapatan asli daerah, bahwa minahasa selatan lebih rendah dengan presentase 4,55% (sangat kurang) sedangkan kota manado 9,46% (sangat kurang). Ini membuktikan bahwa kabupaten minahasa selatan dan kota manado belum maksimal dalam pengelolaan PBB-P2, kurangnya pemanfaatan dan mengoptimalkan pendapatan yang termasuk dalam objek PBB-P2 dengan adanya faktor lain yang mempengaruhi kurangnya kontribusi PBB-P2 dalam pendapatan asli daerah.

H₂: hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten minahasa selatan dan kota manado masih sangat kurang optimal dalam pengelolaan PBB-P2 sebagai sumber pendapatan bagi daerahnya masing-masing.⁵²

⁵²*Ibid*, h.208

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁵³

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian skripsi ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif deskriptif yaitu penelitian yang berlandaskan pada penemuan-penemuan yang dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau pengukuran, untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data, menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Metode ini sebagai metode ilmiah/*scientific* karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yang konkrit/empiris, obyektif, terukur, rasional, dan juga sistematis.⁵⁴ Penelitian kuantitatif juga adalah penelitian yang banyak di tuntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran data tersebut, serta penampilan dari hasilnya. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literature (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu mengenai PBB-PP.

⁵³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h.5

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2014,) h.7.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Tingkat Efisiensi penerimaan PBB-P2 Kabupaten Lampung Selatan tahun 2015- 2018 secara keseluruhan menunjukkan kriteria nilai interpretasi sangat efisien, dengan rata-rata sebesar 2,47% yang berarti bahwa Kabupaten Lampung Selatan telah baik dan optimal dalam memanfaatkan biaya pemungutan, sehingga semakin efisien organisasi itu berjalan.
2. Tingkat Efektivitas penerimaan PBB-P2 Kabupaten Lampung Selatan tahun 2015-2018 secara keseluruhan menunjukkan kriteria nilai interpretasi sangat efektif, dengan rata-rata sebesar 148,78%, yang berarti bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan telah berhasil mencapai tujuan dalam merealisasikan pajak PBB-P2 sehingga dikatakan telah berjalan dengan efektif.
3. Kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Selatan tahun 2015-2018 secara keseluruhan menunjukkan kriteria nilai interpretasi kurang, dengan rata-rata sebesar 7,27%. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Lampung Selatan kurang dalam mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan PBB-P2 yang menyebabkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah masih kurang. Tingkat kontribusi semakin menurun setiap tahunnya, hal ini

karena realisasi PAD selalu meningkat setiap tahunnya, akan tetapi realisasi PBB-P2 masih bersifat fluktuatif.

4. Pandangan Islam Mengenai PAD yang Bersumber dari PBB-P2
 Pandangan Ekonomi Islam mengenai PAD yang bersumber dari PBB-P2, dapat dilihat dari persamaan antara *Kharaj* dan PBB-P2 terlihat dari objek dan subjek pajaknya, dilihat dari objek *kharaj* dan PBB-P2 merupakan kewajiban yang di bebankan atas pemanfaatan tanah yang dimilikinya dan di ambil manfaatnya oleh masyarakat, harus dibayarkan kepada pemerintah. Dalam Islam *kharaj* di perbolehkan dan digunakan untuk memperoleh pendapatan Negara pada masa Rasulullah, maka PBB-P2 pun di perbolehkan dalam Islam selama penarikan PBB-P2 sesuai dengan atuaran pemerintah dan tidak menggunakan cara yang bathil.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat diajukan berdasarkan hasil penelitian ini adalah:

1. Bagi pengelola pajak dan Pemerintah harus transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan uang pajak sehingga masyarakat tidak ragu dengan uang yang mereka bayarkan akan digunakan untuk apa, sehingga masyarakat wajib pajak tidak akan enggan dalam membayar pajak.
2. Pemerintah daerah diharapkan terus menggali potensi-potensi yang masih ada di Kabupaten Lampung Selatan dengan begitu akan

menambah penerimaan PBB-P2 sehingga akan mencapai target yang telah ditetapkan.

3. Agar Efisiensi dan Efektivitas serta Kontribusi pengelolaan PBB-P2 dapat secara konsisten dipertahankan, perlu selalu dilakukan pengawasan dan pengevaluasian di berbagai seksi/divisi, serta selalu berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat/wajib pajak.
4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat menambah wawasan dan memperbaiki serta menambah waktu penelitian yang terbaru agar hasil yang didapat lebih akurat.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta: Salemba Empat, 2004
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Pendekatan Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Aulia Sukmawati, "Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan PBB Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah PBB di Kabupaten Banyumas Periode Tahun 2013-2015" *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, JIMEKA Vol. 2, No.3,
- A.W. Widjaja, *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom Jakarta: PT Raja Grafindo Persada*, 2002
- Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti, *Akuntansi Sektor Publik Edisi 2*, Jakarta: Salemba Empat, 2016
- Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya* Bandung : CV Penerbit Diponogoro, 2005
- Edi Novian *Kabid PBB dan BPHTB BPPRD Lampung Selatan, kanan Tengah Ditemui Dikantornya*
- Felia Lintong, Harijanto Sabijono, Meily Y. B. Kalalo, *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 13(4), 2018
- Galih Wicaksono dan Tree Setiawan Pamungkas, *Jurnal STIE SEMARANG* Vol 9 No. 1 Edisi (ISSN:2085-5656),
- Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah Edisi Revisi* Jakarta: Rajawali pers, 2011
- <http://lampungselatankab.bps.go.id/statictable>,

Ida Ayu Metha Apsari Prathiwi, Nyoman Trisna Herawati, Ni Luh Gede Erni Sulindawati, Analisis Strategi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan PBB-P2 Serta Efektivitas Penerimaannya di Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2013-2014 *Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1. Vol 3,*

Kinanti Amalia Sari, “Analisis Sebelum dan Sesudah Pengalihan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan PBB-P2 menjadi Pajak Daerah Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Jember

Lukas Setiaatmaja, *Statistik Untuk Bisnis dan Ekonomi*, Yogyakarta: ANDI, 2011

Mahmudi, *Manajemen Keuangan Daerah*, Jakarta: Erlangga, 2010

Mohamad Mahsun dkk, *Akuntansi Sektor Publik Edisi 2*

Majelis Kajian Interaksi Tafsir Ayat Al-Qur'an". Online, Tersedia di: <http://mkitasolo.blogspot.com/>

Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: ANDI OFFSET, 2004

Nasib Muhammad Ar-rifa'i. 1999, *Kemudahan dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid I* Jakarta: Gema Insani

Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen Edisi Pertama*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2002

Oyok Abuyamin, *Perpajakan Pusat dan Daerah*, Bandung: Humaniora, 2013

Pusat Ilmu Nusantara". Online, Tersedia di: <https://dalamislam.com>

Ratmini dan Septi Antik Winarsih, *Manajemen Pelayanan Pustaka Belajar Yogyakarta*, 2000

Raudhatun Wardani dan Wida Fadhlia, “Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Besar”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, JIMEKA Vol. 2, No.3, 2017

Rudi Saputro dkk, “Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan PBB-P2 Terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah, PAD Studi pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya”

Reza Arditia, “Analisis Kontribusi dan Efektifitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya”

Sekaran, uma & Roger Bougie, Research Methods for Business: A Skill-Building Approach. Fifth Edition. USA: Willey, 2013

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016

Sutrisno Hadi, *Metode Reasearch*, Yogyakarta:ANDI, 2002

Tafsir Al-Muyassar/Kementrian Agama Studi Arabia. Online, Tersedia di: <https://tafsirweb.com>,

Wiratna, Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015